

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Upaya pembangunan tersebut meliputi kegiatan peningkatan dari segala aspek. Aspek tersebut terdiri dari aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa, bernegara. Selain itu, upaya pembangunan tersebut juga meliputi proses pembangunan seluruh sistem penyelenggaraan negara. Peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan penting dilakukannya pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor pendorong utama dalam hal pembangunan. Selain faktor ekonomi, kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya alam juga menjadi faktor pendorong lain yang dapat memperkuat hal pembangunan yang selaras (Nugraha, 2021).

Sumber daya alam yang ada di Indonesia juga memiliki potensi yang beraneka ragam sehingga di beberapa daerah mempunyai sektor pariwisata yang menyangga untuk bisa dikembangkan sedemikian ragam tentunya dilihat dari kondisi geografis daerahnya (Wahyuningsih, 2021). Agar tercapainya tujuan berupa sasaran dari pembangunan nasional serta pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan keseimbangan dan keserasian dalam melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan menjadi program dapat ditinjau berdasarkan tahapan kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan dan jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelaku penyelenggaraan dalam hal kesejahteraan sosial adalah perorangan, kelompok,

lembaga kesejahteraan sosial dan juga masyarakat. Peran masyarakat berupa kontribusi dalam hal membuka peluang ekonomi dengan memperhatikan struktur sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif merupakan aspek penting dalam hal kesejahteraan sosial. Jika seluruh lapisan masyarakat menyadari perlunya pemerataan sebagai wujud keadilan sosial, maka perekonomian daerah berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 merupakan Undang-undang yang menjelaskan tentang desa. Undang-undang tersebut berisi bahwa kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya baik kewenangan skala lokal desa, asal-usul dan penugasan. Desa merupakan sentral pengembangan ekonomi karena sektor awal perputaran kegiatan perekonomian. Kendatipun desa dipandang jauh tertinggal dibanding dengan perkotaan baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas lainnya. salah satu tugas pemerintahan desa yaitu dapat membangun daerah pedesaan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan beragam usaha pedesaan, sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian desa, memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan asumsi diatas salah satu bentuk kelembagaan pada tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan pemerintah dengan kegiatan berupa pengelolaan dan kepemilikan modal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kelembagaan BUMDes bertujuan mendukung kebijakan mikro pemerintah,

terutama untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan aset desa sehingga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. keberhasilan BUMDes diukur dari pendapatan masyarakat desa dalam suatu desa tersebut. BUMDes juga dapat membantu meningkatkan kemampuan bernegosiasi, menciptakan strategi pengembangan desa, meningkatkan kewirausahaan, dan meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Dengan hal itu, dapat membantu desa mengoptimalkan potensi desa (Irawan, 2017).

Prinsip-prinsip mendasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diantaranya (1) kooperatif, (2) Partisipatif, (3) Transparansi, (4) Emansipatif, (5) Aktivitas akuntabel, (6) Sustainable (Widiastuti, 2019). Adanya lembaga BUMDes beserta kinerjanya, maka diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi. Kontribusi tersebut berupa peningkatan dari kehidupan masyarakat yang signifikan dan menjadi pilar kemandirian desa (Widiastuti, 2019). Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dapat menentukan keberhasilan dalam hal pembangunan. Sedangkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas rendah dapat menjadi penghambat dalam hal membangun komunikasi, pada akhirnya dapat menghambat upaya pembangunan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi diantaranya, wisata alam, budaya, religi, posisi yang strategis, infrastruktur memadai, potensi tenaga kerja dan konsumen (pasar) dan ketersediaan lahan pengembangan kawasan. Keberagaman tersebut memiliki ciri khas tersendiri bagi daerah. Apabila potensi tersebut dikelola secara optimal dapat menjadi pemasukan baru bagi desa dan peluang bagi masyarakat dalam

meningkatkan perekonomian termasuk sektor unggulan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah (Wahyuningsih, 2021).

Selepas permasalahan diatas, Kabupaten Gresik memiliki 322 Badan Usaha Milik Desa salah satunya di Kecamatan Menganti tepatnya Desa Hendrosari. Desa Hendrosari yang gersang dulunya dikenal masyarakat dengan yang buruk karena menjadi salah satu tempat produksi minuman tradisional Tuak terbuat dari buah siwalan telah difermentasi. Maka pemerintah Desa mengubah stigma buruk terhadap desa dengan memberdayakan masyarakat dan pengembangan potensi Desa yang lebih baik dan layak dikonsumsi. Pengembangan desa wisata juga termasuk usaha untuk memperbaiki citra dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Pendirian BUMDes Lontar Sewu desa Hendrosari diresmikan pada tahun 2018 dan memulai operasi tahun 2019 dibentuk melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDes Lontar Sewu Desa Hendrosari ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang tumbuh dari bawah. Selain itu juga BUMDes Lontar Sewu berasaskan gotong royong. Selama 5 tahun Badan Usaha Milik Desa sudah mulai menunjukkan aktivitasnya dan mendapat sambutan positif dari masyarakat dan juga dalam perjalanannya tergolong baru oleh karena itu, membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi untuk memperkuat perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Terlepas itu semua bahwa aspek mandiri dan profesional harus dilakukan dalam pengelolaan BUMDes (Hartini, 2018).

BUMDes Lontar Sewu Desa Hendrosari memiliki beberapa jenis usaha. Jenis usaha tersebut meliputi unit usaha TPST- 3R, unit usaha Edu Wisata Lontar Sewu, unit usaha gedung serba guna. Pengelolaan BUMDes seringkali

menghadapi permasalahan atau kendala. Hal tersebut mengakibatkan belum tercapainya dampak yang baik yang ditujukan masyarakat. Mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani, karyawan swasta. Sehingga masih terdapat kemiskinan dan tertinggalnya perekonomian desa tersebut. Pada tahun 2018 sekelompok mahasiswa Unesa mengajukan proposal ke KemenristekDikti dan berhasil mendapatkan bantuan sebesar Rp. 40.000.000 dengan dana tersebut pihak Desa dan BUMDes mengubah tempat lapangan dengan menambahkan beberapa spot foto sehingga terlihat menarik untuk dikunjungi.

Desa Hendrosari mendapat penghargaan yaitu ketika mengikuti lomba yang diadakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk dapat menunjukkan potensi alam yang ada di Desa Hendrosari dan mendapat juara 3 dalam lomba tersebut. Pada tahun 2019 terdapat obyek kawasan yang berpotensi menarik pengunjung lokal yang dikembangkan BUMDes unit usaha ke 2 yaitu Edu Wisata Lontar Sewu yang berhasil mendapatkan bantuan dari kementerian desa program pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta bantuan inkubasi desa (PID-PEL) sebesar Rp. 1.311.597.50. ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi pasar, dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui “Kemitraan”. Melalui program ini desa akan difasilitasi dan didorong untuk dapat menciptakan dan melakukan pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, termasuk Koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDes).

Desa Hendrosari terpilih dikarenakan faktor potensi alam yaitu pohon lontar dimana hanya ada 3 jenis yaitu (borassus), yaitu *Borassus aethiopum* Mart, *Borassus flabellifer* Linn, dan *Borassussundaicus* Becc (Wahyuningsih, 2021). dan salah satu jenis lontar tersebut tumbuh subur di Desa Hendrosari. Sebanyak 3600

Pohon Lontar tumbuh subur di Desa Hendrosari sehingga mendapat julukan sebagai Lontar Sewu. Pengelolaan Edu Wisata Lontar Sewu diprakasai oleh BUMDes dimana BUMDes memberdayakan dan mempertahankan eksistensi tempat wisata tersebut. Terdapat 119 petani yang diuntungkan dengan naiknya pendapatan mereka dari penghasilan mereka, meskipun tidak setiap hari. Pembangunan wisata diiringi dengan pedagang yang berjualan di lokasi wisata tersebut, namun tidak semua warga bisa mendapatkan tempat untuk menjual belikan produknya. Terdapat 108 UMKM yang dapat berjualan disekitar area wisata, kemudian di pilih lagi menjadi 47 UMKM. Dikarenkaan terbatasnya lahan disekitar area wisata. Jadi permasalahan yang muncul dari pendirian BUMDes adalah kurangnya bantuan pembangunan prasarana, bantuan modal sosial dan penguatan kelembagaan yang terdiri dari norma dan kesepakatan masyarakat belum beroperasi secara maksimal.

Pendirian BUMDes Lontar Sewu merupakan bentuk pengelolaan ekonomi produktivitas pedesaan agar terwujudnya masyarakat desa dengan daya saing mandiri sebaiknya tidak mematikan usaha perekonomian. Selain kesiapan, hal tersebut juga membutuhkan kapasitas dari aparat desa dalam menjalankan ide pokok yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk memerangi kemiskinan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh desa Hendrosari. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan panduan bagi pendirian dan pengembangan BUMDes dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes memainkan peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa. Menurut Hutomo (2000) pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam berapa kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan, yaitu bantuan modal untuk

pengelolaan tempat wisata, bantuan pembangunan prasarana agar terdapat banyak fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan, bantuan pendampingan seperti pelatihan-pelatihan juga arahan dari pemerintah desa itu sendiri. Berawal dari potensi desa yang apabila tidak dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemahaman pada penjelasan, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diangkat dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang timbul pada latar belakang sehingga didapatkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu, bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya. Sehingga didapatkan sebuah tujuan dalam penelitian ini. Tujuan tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal pemberdayaan masyarakat pada Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan mengenai pengembangan dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan ilmu tersebut berupa pemberdayaan masyarakat desa. selain itu, hasil penelitian dapat memberikan masukan positif dalam melaksanakan kegiatan kebijakan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan pendorong dari performa milik suatu lembaga agar dapat mewujudkan tujuannya.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tumpuan serta ladang informasi bagi peneliti lainnya agar dapat dilakukan kegiatan berupa penelitian lanjutan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintahan desa dalam memperbaiki hal yang kurang dalam menjalankan perannya.